

**PERAN PENGAWAS DALAM MENERAPKAN PENGENDALIAN
INTERN PEMBERIAN KREDIT PADA GABUNGAN KOPERASI
PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA JAWA TIMUR**

**REVI ARFAMAINI
TJIPTOHADI SAWARJUWONO**
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Airlangga

ABSTRAK

Penerapan pengendalian intern merupakan salah satu upaya yang harus dilakukan organisasi untuk meningkatkan efektivitas kegiatan operasionalnya. Cara menerapkan pengendalian intern adalah mengimplementasikan kerangka kerja terintegrasi yang dipublikasikan oleh COSO tahun 1992. Pengendalian intern tidak hanya dilakukan pada organisasi, koperasi simpan pinjam pun harus menerapkan pengendalian intern. Hal ini dikarenakan, koperasi simpan pinjam memiliki aktivitas yang berupa pemberian pinjaman secara kredit kepada para anggota. Pemberian pinjaman secara kredit dapat menimbulkan piutang yang belum berhasil tertagih sehingga memiliki ancaman yang dapat menyebabkan kerugian. Ancaman tersebut antara lain kredit macet, human error dan kecurangan. Pengendalian intern akan berjalan sesuai dengan rencananya, jika pengawas koperasi melakukan fungsi sebagai auditor internal untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas penerapan pengendalian intern yang sudah berjalan pada koperasi simpan pinjam. Sehingga, tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui peran pengawas sebagai fungsi auditor internal dalam penerapan pengendalian intern terhadap pemberian kredit pada GKPRI JATIM.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode participation observation untuk mengetahui penerapan pengendalian intern yang terjadi pada GKPRI JATIM. Selanjutnya, melakukan penilaian pengendalian intern GKPRI JATIM sehingga dapat diketahui peran pengawas sebagai fungsi auditor internal berdasarkan komponen-komponen kerangka kerja pengendalian yang dipublikasikan oleh COSO tahun 1992. Hasilnya, pengawas harus memperhatikan beberapa hal yaitu struktur organisasi yang dibuat koperasi, prosedur dan kebijakan pemberian kredit yang diterapkan koperasi, pemetaan risiko dan melakukan penilaian terhadap seluruh aktivitas pengendalian pemberian kredit yang dilakukan manajemen untuk dapat mendeteksi permasalahan yang muncul sejak dini. Sehingga, pengendalian intern dapat berjalan secara efektif.

Kata Kunci: *Pengawas, Auditor Internal, Pengendalian Intern, Kerangka Kerja Pengendalian Intern oleh COSO tahun 1992, Efektivitas.*

ABSTRACT

Implementation of internal control is one of the organization's efforts must be made to improve the effectiveness of its operations. How to implement internal control is to implement an integrated framework published by COSO in 1992. Internal control not only on the organization, credit unions must implement internal control. This is because credit unions have an activity in the form of lending on credit to members. Lending on credit can lead to an unsuccessful uncollectible receivables that have threats that can cause harm. Threats include non-performing loans, human error and fraud. Internal controls will be run in accordance with the plan, if the controller cooperatives perform functions as an internal auditor to evaluate and provide recommendations on the implementation of internal control improvements that have been running on credit unions. Thus, the purpose of this study was to determine the role of the controller as a function of the internal auditor in the application of internal control of credit on GKPRI JATIM. The method used is the method of participation observation to determine the application of internal control GKPRI JATIM. Furthermore, assessment of internal control so as to know GKPRI JATIM controller role as internal auditor

function components based control framework published by COSO in 1992. As a result, controllers should

consider several things that made cooperative organizational structure, procedures and policies are implemented cooperative lending, risk mapping and assessment of all credit control activities undertaken management to be able to detect problems that emerge early on. Thus, internal control can be run effectively.

Keywords: *Controller; Internal Auditor; Internal Control, Internal Control Framework by COSO in 1992, Effectiveness.*

PENDAHULUAN

Salah satu upaya yang harus dilakukan organisasi untuk meningkatkan efektifitas operasional perusahaan adalah menerapkan pengendalian intern (Michael, 2008: hal.29). Cara menerapkan pengendalian intern adalah mengimplementasikan kerangka kerja terintegrasi yang dipublikasikan oleh COSO pada tahun 1992 (Gupta & Thomson, 2006).

Pengendalian intern selalu diterapkan pada masing-masing organisasi yang gunanya untuk meningkatkan efektifitas operasional organisasi, termasuk pada organisasi koperasi simpan pinjam. Begitu pula dengan Gabungan Koperasi Pegawai Republik Indonesia Jawa Timur (GKPRI JATIM) yang juga harus menerapkan pengendalian intern karena memiliki tujuan yang ingin dicapai. Selain itu, pengendalian intern diperlukan untuk meminimalisasi permasalahan yang ada. Seperti, permasalahan yang menjadi fokus utama pada GKPRI JATIM berupa pemberian kredit berupa uang yang menimbulkan besarnya jumlah piutang yang belum berhasil tertagih. Sehingga, mengharuskan manajer untuk membuat desain pengendalian intern yang memadai sehingga menghasilkan informasi yang sesuai dengan kondisi.

TINJAUAN PUSTAKA

Setiap entitas perlu memahami ruang lingkup pengendalian intern yang merupakan dasar munculnya permasalahan, sehingga pengendalian intern perlu dikembangkan dengan berbagai macam metode. Salah satu cara mengembangkan pengendalian intern yaitu dengan menggunakan metode Internal Control Integrated Framework yang dipublikasikan oleh COSO. Menurut COSO, pengendalian intern adalah suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu yang dipengaruhi oleh setiap badan suatu entitas (Hubbard, 2003). Tujuan tersebut terdiri dari (Ricketts, 1992 ; Stevens, 2003):

1. Keandalan laporan keuangan.
2. Efektifitas dan efisiensi operasi.
3. Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku.

Penerapan pengendalian intern yang terdapat pada GKPRI JATIM dengan cara melakukan pengawasan dan pengelolaan yang dilakukan oleh pengawas dan pengurus yang meliputi empat bidang pemeriksaan. Pengurus dapat memilih seorang manajer untuk mengelola secara detail kegiatan operasional koperasi sehingga pengendalian intern pada koperasi dapat diterapkan sebagaimana mestinya. Namun, manajer dan karyawan membutuhkan evaluasi agar kemampuan dalam mengelola operasional koperasi dapat meningkat (Candreva, 2006). Sehingga, perlu adanya peran pengawas dalam melaksanakan fungsi auditor interna untuk mengevaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas penerapan pengendalian intern yang sudah berjalan.

Maka, perlu dilakukan penelitian untuk mengetahui peran pengawas koperasi sebagai fungsi auditor internal dalam menerapkan pengendalian intern. Sehingga, diharapkan kegiatan operasional koperasi dapat berjalan efektif, artinya dapat meminimalisasi permasalahan yang ada.

COSO dibentuk pada tahun 1985 yang merupakan sebuah organisasi independen yang disponsori oleh 5 (lima) organisasi besar dan lembaga akuntansi profesional di Amerika Serikat yang terdiri dari (Olach and Weeramantri, 2009):

1. The American Accounting Association (AAA).
2. The American Institute of Certified Public Accountants (AICPA).
3. Financial Executive Institute (FEI).
4. The Institute Of Internal Auditors (IIA).
5. The Institute Of Management Accountants (IMA).

Pada tahun 1992, COSO berhasil membuat kerangka kerja dari berbagai macam definisi-definisi yang telah dibangun. Kerangka kerja tersebut dikenal dengan nama *Internal Control-Integrated Framework* yang menjadi pedoman para eksekutif, dewan direksi, penyusun standar dan organisasi lainnya untuk

mengukur efektifitas pengendalian intern mereka (Anonymous, 1992). Selain itu, COSO juga menetapkan definisi, komponen-komponen serta kriteria terhadap pengendalian intern yang dapat dievaluasi (Rezaee, 1994). Komponen-komponen COSO terdiri dari lima komponen pengendalian intern yang saling berhubungan, yaitu (Janvrine et al., 2012):

1. Lingkungan Pengendalian (*Control Environment*).
2. Penaksiran Risiko (*Risk Assessment*).
3. Aktivitas Pengendalian (*Control Activities*).
4. Informasi dan Komunikasi (*Information and Communications*).
5. Pemantauan (*Monitoring*).

Pengendalian intern dapat terlaksana dengan baik jika adanya peran auditor internal atau bagian pengawasan intern (Muljono, 2012: hal.377). Auditor internal dapat disebut sebagai konsultan internal dalam sebuah organisasi (White, 2007). Auditor internal berperan dalam memberikan rekomendasi terkait dengan permasalahan yang muncul (Szczeplankiewicz, 2010). Peran auditor internal biasanya sering diperlukan dalam proses monitoring (pemantauan) suatu organisasi (COSO, 2003 dalam Peurseem, 2004). Maka, adanya audit internal memiliki fungsi pada suatu organisasi yaitu untuk menyediakan jasa analisis dan evaluasi serta memberikan keyakinan dan rekomendasi serta informasi lain kepada manajemen

dan dewan komisaris (Whitehouse, 2012). Audit internal juga bertugas untuk memonitor dan menilai kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur organisasi (Bodnar & Hopwood, 2010). Jadi, fungsi audit internal harus menunjukkan penerapan aktivitas audit internal secara menyeluruh terhadap seluruh aktivitas perusahaan, sehingga tidak hanya dibatasi pada audit atas catatan-catatan akuntansi.

Bagian pengawas pada koperasi simpan pinjam, harus memiliki peran sebagai fungsi auditor internal. Pengawas melakukan pengawasan untuk menetapkan dan memeriksa pekerjaan apa saja yang sudah dilaksanakan. Setelah itu, pengawas dapat menilai pekerjaan tersebut apakah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan atau tidak. Pengawas juga melakukan pemeriksaan dan penilaian kecocokan antara seluruh kegiatan yang ada dikoperasi dengan prosedur dan kebijakan yang telah ditetapkan. Selain itu, pengawas juga memeriksa catatan-catatan yang berhubungan dengan keuangan. Sehingga, dari hasil pemeriksaan dan penilaiannya, pengawas dapat memberikan saran dan rekomendasi untuk perbaikan dalam mengelola koperasi. Jadi, pengawas pada koperasi mempunyai fungsi yang sama dengan pemeriksaan intern (Hendrojogi, 2002; 159).



METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode *participating observation* (Langhout, 2003 ; Palson, 2007 ; Culley & Hughey, 2008 ; Bohm Legewie & Dienel, 2008 ; Hofman, 2009 ; Keiding, 2010;). Penelitian ini difokuskan pada penerapan pengendalian intern pemberian kredit, sehingga dapat dijadikan dasar untuk mengetahui peran pengawas sebagai fungsi auditor internal.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif karena data tersebut berupa fakta-fakta tertulis atau lisan. Data dan informasi yang akan diperoleh berupa penerapan pengendalian intern pemberian kredit pada GKPRI JATIM. Sumber perolehan data dan informasi dilakukan dengan cara:

- 1) Observasi (Langhout, 2003 ; Palsson, 2007 ; Keiding, 2010).
Observasi merupakan cara memperoleh data dan informasi melalui pengamatan penerapan pengendalian intern pada pemberian kredit

GKPRI dengan mengacu pada kerangka pengendalian intern COSO tahun 1992.

- 2) Dokumentasi (Culley & Hughey, 2008)
Dokumentasi merupakan cara memperoleh data dan informasi melalui pengumpulan dokumen-dokumen yang dibuat manajemen GKPRI dalam menerapkan pengendalian intern pada pemberian kredit.
- 3) Wawancara formal dan informal (Palsson, 2007; Bohm, Legewie & Dienel, 2008 ; Hofman, 2009).
Wawancara merupakan cara memperoleh data dan informasi melalui tanya jawab. Wawancara formal ditujukan kepada manajer GKPRI karena manajer yang mengetahui dan melakukan seluruh pengendalian terhadap proses pelaksanaan kegiatan operasional dan manajer yang melakukan pengambilan keputusan awal. Selain itu, tanya jawab dilakukan kepada pengawas koperasi dalam bentuk kuesioner. Kuesioner dibuat dengan tujuan mengetahui pengendalian intern yang dilakukan pengawas dalam tugas yang dijalankan.

Setelah memperoleh data dan informasi, maka langkah selanjutnya adalah menganalisa data dan informasi yang telah didapat. Cara menganalisa dan mengolahnya adalah sebagai berikut:

1. Memilah data dan informasi berdasarkan cara pengumpulannya yaitu observasi, dokumentasi dan wawancara.
2. Setelah memilah data dan informasi, mengelompokkan sesuai dengan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara berdasarkan komponen-komponen kerangka kerja pengendalian intern COSO tahun 1992.
3. Setelah hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dikelompokkan, mengaitkan hasil tersebut sesuai dengan komponen-komponen kerangka kerja pengendalian intern COSO tahun 1992.

ANALISADATADANPEMBAHASAN

Berdasarkan penerapan metode penelitian diatas, diperoleh penerapan pengendalian intern dan peran pengawas pada pemberian kredit pada GKPRI JATIM didasarkan pada lima komponen COSO tahun 1992 sebagai berikut:

Lingkungan Pengendalian

Lingkungan pengendalian menggambarkan pengendalian terhadap kegiatan operasional pemberian kredit GKPRI JATIM. Manajemen GKPRI JATIM menerapkan lingkungan pengendalian pemberian kredit yang terdiri dari:

1. Melakukan pembagian tugas, wewenang serta tanggung jawab. Pembagian tersebut diberikan kepada pihak-pihak yang melayani dalam proses pemberian kredit. Pihak-pihak yang terlibat adalah bagian kredit, kasir, bagian administrasi dan manajer.
2. Pembuatan prosedur dan kebijakan manusia yang meliputi melayani peminjam, mencatat transaksi pemberian kredit serta membuat laporan mengenai latar belakang peminjam, jumlah dana yang diminta oleh peminjam, pembayaran tagihan peminjam, jangka waktu pinjaman dana dan jumlah pinjaman yang harus dibayar (piutang). Prosedur secara tertulis belum ada. Jadi, langkah-langkah yang harus ditempuh karyawan berdasarkan pengalaman karyawan terdahulu yang diajarkan kepada karyawan lama. Seluruh langkah-langkah tersebut sesekali di periksa oleh manajer koperasi.

4. Melaporkan hasil observasi, dokumentasi dan wawancara dalam bentuk penelitian berupa tesis berdasarkan teori yang dibahas.

Setelah data dan informasi hasil observasi, dokumentasi dan wawancara diolah dan dianalisis, akan menghasilkan sebuah temuan yang akan diinterpretasikan dalam bentuk deskriptif. Pada hasil tersebut dapat diketahui berbagai permasalahan yang ada pada penerapan pengendalian intern berdasarkan komponen-komponen kerangka kerja pengendalian intern COSO tahun 1992 pada pemberian kredit GKPRI. Sehingga, permasalahan tersebut dapat dijadikan dasar untuk mengetahui peran pengawas berdasarkan teori mengenai hal-hal yang harus dilakukan oleh pengawas sebagai fungsi auditor internal.



3. Memperhatikan kompetensi dan kemampuan karyawan dengan cara melakukan penempatan sesuai dengan pendidikan, pengeluaran, keterampilan serta pengalaman yang dimiliki sumber daya manusia. Koperasi tersebut juga menetapkan spesifikasi yang jelas mengenai uraian pekerjaan dan latar belakang pendidikan dan pengalaman untuk menduduki posisi tertentu.

Peran Pengawas pada Lingkungan Pengendalian

Pengawas harus memberikan penilaian dan rekomendasi terhadap penerapan pengendalian intern pada GKPRI JATIM pada lingkungan pengendalian. Penilaian dan rekomendasi tersebut meliputi:

1. GKPRI JATIM belum memiliki struktur organisasi, oleh karena itu pengawas perlu memberikan gambaran mengenai struktur organisasi yang sesuai dengan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.
2. GKPRI JATIM belum memiliki prosedur dan kebijakan manusia secara tertulis yang harus ditaati oleh karyawan. Sehingga, pengawas perlu memberikan rekomendasi terkait dengan pembuatan prosedur dan kebijakan manusia untuk menunjang lancarnya proses pemberian kredit:
3. GKPRI JATIM sudah membuat pembagian dan uraian tugas yang harus dijalankan oleh karyawan. Namun, pada bagian kredit, tidak diberikan fungsi sebagai analis kredit. Sehingga, pengawas perlu memberikan rekomendasi kepada pengurus terkait dengan hal-hal yang harus diperhatikan dalam analisa kredit.

Penaksiran Risiko

Penaksiran risiko merupakan hal penting dalam setiap manajemen suatu organisasi untuk menghadapi masalah yang pernah atau yang akan muncul. Karena, masalah yang akan muncul biasanya disebabkan oleh risiko bawaan. Begitu pula risiko yang muncul pada GKPRI, disebabkan oleh permasalahan yang sudah ada sebelumnya. Berikut ini masalah-masalah yang pernah muncul adalah sebagai berikut :

1. Pihak peminjam dana kredit tidak dapat atau tidak mau memenuhi kewajiban untuk membayar dana yang dipinjamnya karena peminjam tersebut benar-benar meninggal dunia dan menghilangkan jejak. Kasus yang pernah terjadi ini menimbulkan kredit macet murni. Ada pula kasus lain yang pernah terjadi berupa kredit macet tidak murni yaitu kredit yang masih bisa ditagih tapi dianggap kredit macet. Namun, kenyataannya kredit tersebut tetap dapat ditagih oleh karyawan tapi tidak dilaporkan pada kasir koperasi. Kasus-kasus tersebut dapat menimbulkan kerugian bagi koperasi.
2. Tidak adanya prosedur kegiatan operasional secara tertulis yang dilakukan karyawan dan sistem pencatatan transaksi masih dilaksanakan secara manual sehingga terdapat kemungkinan terdapat *human error* dan penyimpangan yang dilakukan oleh para staff karyawan.
3. Tidak patuhnya karyawan dalam mentaati jam kerja yang harus dijalankan karyawan. Jika karyawan tidak mentaati jam kerja yang telah ditentukan, maka berpengaruh pada tugas-tugas yang diberikan kepada karyawan yaitu:
 - a. Karyawan tidak bisa menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya.
 - b. Karyawan bisa saja menyelesaikan pekerjaan tepat pada waktunya, namun masih terdapat kesalahan dalam melakukan pencatatan dan membuat laporan.
 - c. Banyak alasan yang diungkapkan dalam target menyelesaikan tugas yang berujung pada saling menyalahkan antar karyawan.
4. Masih menggunakan sistem manual dalam mengerjakan tugas-tugas yang diberikan kepada karyawan. Namun, sistem komputerisasi tetap dilakukan namun sistem tersebut hanya digunakan dalam membuat laporan yang akan diberikan kepada manajer.

Peran Pengawas pada Penaksiran Risiko

Pengawas berperan penting membantu manajemen untuk memberikan rekomendasi terhadap risiko yang muncul. Sehingga, pengawas dapat melakukan

pemetaan risiko sesuai dengan masalah yang pernah muncul. Pemetaan risiko pada GKPRI JATIM sebagai berikut:

- a. Risiko Kredit

Risiko kredit kemungkinan muncul karena pernah terdapat kredit macet yaitu tidak mempunya peminjam dalam membayar tagihannya yang disebabkan beberapa hal. Oleh karena itu, pengawas perlu memberikan rekomendasi dalam pembuatan prosedur dalam proses pemberian kredit agar kredit macet tersebut dapat diminimalisasi. Berikut ini prosedur pemberian kredit yang dapat diusulkan oleh pengawas:
- b. Risiko Operasional

Risiko operasional juga kemungkinan muncul karena terdapat permasalahan pada karyawan dalam menjalankan tugasnya yaitu membuat laporan piutang dan melakukan konfirmasi pembayaran piutang. Selain itu, seluruh pembuatan laporan dilakukan secara manual. Oleh karena itu, pengawas harus memberikan rekomendasi untuk pembuatan prosedur dalam melakukan penagihan piutang.
- c. Risiko Kepatuhan

Risiko kepatuhan harus diperhatikan oleh pengawas, karena permasalahan yang muncul juga disebabkan karena tidak patuhnya karyawan terhadap peraturan seperti tidak tepat waktu dalam kehadiran bekerja. Hal tersebut berpengaruh pada ketepatan dalam menyelesaikan pekerjaan dan *human error* dalam mengerjakan suatu laporan karena dikerjakan dengan tergesa-gesa. Rekomendasi yang diberikan karyawan dalam bentuk prosedur dan kebijakan sumber daya manusia.

Jadi, pengawas hanya memberikan rekomendasi atau saran agar risiko dapat diminimalisasi, namun yang dapat mengendalikan risiko tersebut adalah pihak manajemen GKPRI.

Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian harus dilakukan pada seluruh kegiatan operasional. Hal ini untuk meminimalisasi masalah dan ancaman yang akan muncul. Berikut ini penerapan aktivitas pengendalian GKPRI yang didasarkan pada COSO, yaitu:

1. Pemberian otorisasi harus diperhatikan dan harus diperlukan untuk melakukan pengesahan dokumen-dokumen dalam proses pemberian kredit.
2. Pemisahan tugas dapat mendukung terciptanya pengendalian intern yang memadai. Pemisahan tugasnya dalam bentuk uraian pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.

3. Melakukan penjagaan catatan dan dokumen. Dokumen-dokumen yang ada telah disusun rapi, namun belum terdapat sistem pengkodean untuk memudahkan dalam pencarian dokumen. Dokumen-dokumen juga belum tersusun rapi berdasarkan per bagian tugas karyawan sehingga keberadaan dokumen hanya dapat diketahui oleh karyawan tertentu.
4. Pembuatan prosedur dan kebijakan terhadap pemberian pinjaman kredit. Namun, koperasi GKPRI belum memiliki prosedur dan kebijakan sumber daya manusia. Jika prosedur dan kebijakan pemberian kredit tersebut menimbulkan masalah, maka prosedur dan kebijakan tersebut diperbaharui sesuai kondisi. Pembuatan tersebut juga dilakukan untuk memastikan kesesuaian kegiatan operasional dengan prosedur dan kebijakan dengan didukung dokumen-dokumen yang harus dipenuhi oleh peminjam.

Peran Pengawas pada Aktifitas Pengendalian

Penerapan aktivitas pengendalian pada GKPRI JATIM hanya mengacu pada prosedur dan kebijakan pemberian kredit, padahal masih banyak aktifitas pengendalian yang harus dilakukan oleh koperasi tersebut, diantaranya pengendalian berupa prosedur dan kebijakan sumber daya manusia.

Pengawas harus memperhatikan beberapa hal dalam pembuatan prosedur dan kebijakan sumber daya manusia, yaitu:

- a. Pelatihan dan pengembangan karyawan berupa tata cara dalam menghadapi peminjam meliputi cara bersikap, cara berbicara dan cara merespon dan menyelesaikan masalah informasi yang diterima oleh peminjam.
- b. Ketentuan kehadiran yang merupakan sebagai pendukung dalam ketepatan pengerjaan tugas yang diberikan kepada karyawan sehingga laporan-laporan yang dihasilkan dapat sesuai dengan yang diinginkan oleh GKPRI JATIM. Ketentuan kehadiran dapat berupa presensi yang harus diisi dan ditandatangani karyawan meliputi nama, jabatan, jam kedatangan dan jam pulang.
- c. Tata tertib dan sanksi yang merupakan aktifitas pengendalian yang harus benar-benar diterapkan meliputi penggunaan barang-barang diperusahaan, pemisahan fungsi dalam menjalankan tugas dan aturan terhadap sikap yang seharusnya dilakukan.
- d. Kinerja Karyawan seperti ketentuan dalam berpenampilan, penentuan sikap dalam melakukan seluruh kegiatan dan ketentuan dalam menjaga kebersihan lingkungan.
- e. Pemberian otorisasi terhadap laporan oleh dengan

pihak-pihak yang berwenang untuk mengemban tanggung jawab sesuai dengan pekerjaannya .

Informasi dan Komunikasi

GKPRI JATIM sudah menerapkan informasi dan komunikasi yang berkaitan dengan:

1. Pemberian informasi mengenai proses kredit karena proses inilah yang dapat menimbulkan permasalahan yang muncul pada GKPRI. Keseluruhan pembuatan laporan didasarkan pada dokumen berkas permohonan kredit yang diisi oleh peminjam dan disetujui oleh pengurus GKPRI JATIM.
2. Sedangkan, komunikasi merupakan pemberian informasi yang harus disampaikan karyawan kepada manajer dan manajer merespon pemberian informasi tersebut. Komunikasi yang dilakukan berupa pemberian laporan mengenai proses kredit dan manajer melakukan tanya jawab kepada staff karyawan jika laporan tersebut tidak dipahami. Manajer juga mengajukan beberapa pertanyaan sewaktu-waktu kepada karyawan mengenai jumlah piutang peminjam dan waktu pembayaran peminjam. Hal ini untuk memastikan ketepatan pekerjaan yang dilaksanakan oleh karyawan.

Peran Pengawas pada Informasi dan Komunikasi

Pemberian informasi tidak hanya terkait dengan dokumen-dokumen pendukung dan laporan-laporan yang telah diselesaikan oleh karyawan, namun pengawas juga harus memperhatikan komunikasi yang merupakan cara manajemen memberikan informasi kepada karyawan secara lisan. Informasi dan komunikasi yang harus diperhatikan adalah pada proses:

- a. Penyampaian informasi mengenai persyaratan kredit.
- b. Pengisian formulir permohonan pinjaman oleh peminjam yang mengandung informasi mengenai jumlah pinjaman yang diinginkan, jenis pembayaran kredit yang dipilih, latar belakang peminjam seperti pekerjaan dan pendapatan yang diterima dan jaminan yang diajukan.
- c. Laporan survey kredit kepada peminjam yang dilakukan oleh karyawan bagian kredit.
- d. Dasar keputusan kredit dan pengeluaran kas untuk pemberian pinjaman dana kredit.

Pengawas harus memastikan mengenai keabsahan informasi dan komunikasi yang dilakukan. Cara memastikannya mencocokkan kesesuaian prosedur yang dibuat dengan realisasi pekerjaan yang dilaku-

kan yaitu pengerjaan dokumen dan laporan yang sudah dilakukan oleh masing-masing karyawan sesuai dengan pekerjaannya.

Monitoring

Pemantauan dilakukan dengan cara melakukan pengecekan kegiatan dan dokumen berdasarkan prosedur dan kebijakan yang dibuat yaitu:

1. Permohonan dan persyaratan kredit
Pengecekan dilakukan mengenai penyampaian informasi kepada peminjam mengenai persyaratan kredit yang diajukan. Selain itu pengecekan dilakukan dalam membantu nasabah dalam mengisi formulir permohonan kredit. Pengecekannya dilakukan melalui berkas kredit yang sudah diisi oleh peminjam untuk dipastikan keaslian dan keabsahannya.
2. Jenis pembayaran kredit dan jangka waktu kredit
Pengecekan dilakukan berdasarkan jenis pembayaran kredit yang diajukan oleh peminjam beserta jangka waktu yang disepakati. Seluruh informasinya terdapat pada berkas kredit dan rekapitulasinya. Pengecekan dilakukan dengan menghitung ulang setiap terdapat peminjam baru, untuk memastikan jumlah yang harus dibayar oleh peminjam sesuai dengan jangka waktunya. Namun, pengecekan tidak dilakukan terhadap rekapitulasi yang dibuat oleh karyawan.
3. Analisa dan survey kredit
Analisa kredit yang dilakukan merupakan analisa terhadap semua berkas dan kelengkapan kredit

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berikut ini merupakan kesimpulan yang dapat diperoleh dari hasil pembahasan, bahwa :

1. GKPRI JATIM belum memiliki struktur organisasi dalam kegiatan operasionalnya. Jadi, selama ini kegiatan operasional pemberian kredit pada GKPRI JATIM hanya didasarkan pada uraian pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab.
2. GKPRI JATIM belum memiliki karyawan yang bertugas sebagai analis kredit. Jika memang analis kredit tidak begitu diperlukan pada GKPRI.
3. GKPRI JATIM belum memiliki prosedur dan kebijakan manusia secara tertulis sehingga

yang diajukan oleh peminjam. Sedangkan, survey kredit mencakup kegiatan nasabah, pekerjaan nasabah serta jabatan dan keberadaan nasabah.

Peran Pengawas pada Monitoring

Pemantauan tersebut dilakukan pada seluruh bagian yang ada pada GKPRI JATIM, yaitu dengan cara:

1. Menentukan dasar pemantauan
Pengawas harus mengetahui kegiatan yang dapat menimbulkan permasalahan. Pemantauan yang dilakukan yaitu pada unit simpan pinjam karena pemberian kredit sehingga menyebabkan piutang yang belum tertagih yang disebabkan oleh kredit macet, kesalahan pencatatan.
2. Mendesain dan mengimplementasikan prosedur pemantauan
Pengawas harus membuat prosedur pemantauan yang meliputi pemantauan terhadap prosedur dan kebijakan pemberian kredit, penagihan piutang hingga penerimaan dan pengeluaran kas untuk memberikan pinjaman dan kemampuan karyawan dalam membuat laporan. Mengimplementasikan prosedur tersebut dengan melakukan pengawasan dan pemantauan secara terus menerus.
3. Menilai dan melaporkan temuan
Pengawas harus bisa menemukan temuan-temuan permasalahan. Temuan dapat berupa risiko-risiko yang akan muncul dan risiko bawaan yang sudah pernah ada pada GKPRI JATIM.



memungkinkan tindakan karyawan tidak bisa dikendalikan sehingga menimbulkan fraud.

4. GKPRI JATIM belum memiliki prosedur penyampaian informasi dalam pemberian kredit secara tertulis. Prosedur penyampain pemberian kredit hanya berdasarkan pembagian tugas dan pengalaman karyawan terdahulu.

Saran

Berdasarkan kesimpulan, diberikan saran – saran yang dapat menjadi bahan pertimbangan yang bermanfaat bagi pengawas GKPRI JATIM, yaitu :

1. Pengawas harus memperhatikan dan memberikan rekomendasi dalam pembuatan struktur organisasi berdasarkan tugas, wewenang dan tanggung jawab yang sudah ada pada GKPRI JATIM. Karena, struktur organisasi menggam-

barkan tingkatan wewenang karyawan sehingga dapat menunjang kelancaran dalam proses pemberian kredit.

2. Pengawas harus memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang harus diperhatikan dalam menganalisa kredit agar dapat dijadikan dasar untuk mengevaluasi permohonan kredit.
3. Pengawas harus ikut serta memberikan rekomendasi dalam pembuatan prosedur dan kebijakan dalam menjalankan tugas yang diberikan kepada tiap karyawan.
4. Pengawas harus memperhatikan proses pemberian kredit yang berjalan sehingga dapat menilai dan memberikan rekomendasi mengenai proses penyampaian informasi pemberian kredit yang harus dilakukan karyawan.

Seluruh kegiatan pemberian kredit pada GKPRI JATIM juga menimbulkan risiko-risiko bawaan

ataupun risiko baru yang kemungkinan muncul, sehingga:

1. Pengawas juga harus ikut serta dalam memberikan rekomendasi pada pemetaan risiko sehingga dapat dijadikan dasar manajemen untuk menemukan, menilai dan menyelesaikan permasalahan.
2. Pengawas juga harus melakukan penilaian terhadap seluruh aktivitas pengendalian pemberian kredit yang dilakukan manajemen untuk dapat mendeteksi permasalahan yang muncul sejak dini. Terutama, memperhatikan penanganan terhadap kredit bermasalah dengan cara memberikan rekomendasi untuk membuat standar pelaporan, salah satunya mengenai laporan hasil survey kredit.



DAFTAR PUSTAKA

- Annas, 2012. Efektivitas Pengendalian Internal Pemberian Kredit pada Koperasi Simpan Pinjam Jaya Eka Sakti Salatiga. Universitas Kristen Satya Wacana.
- Anonymous, 1992. Accounting Groups Issue Report on Internal Control. *Management Accounting*. (Vol. 74): 6.
- Anonymous, 2005. Rebalancing Internal Audit in the Sarbanes-Oxley Era. *The CPA Journal*. (Vol. 75): 11.
- Anonymous, 2006. Communicating Internal Control Related Matters Identified in an Audit. *Journal of Accountancy*. (Vol. 202): 97.
- Avallanet, A.W., 2009. The COSO Guidance on Monitoring Internal Control. *Internal Auditing*. (Vol. 24): 3.
- Alizadeh, N., 2012, The Criteria of Implementing and Employing the Effectiveness of Internal Auditing. *Australian Journal of Basic and Applied Science*. (Vol.5): 12.
- Bailey, J.A., 2007. Best Practices for Internal Auditor independence. *Internal Auditing*. (Vol. 22): 2.
- Bohm, B., Legewie, H., and Dienel, L.H., 2008. The Citizens' Exhibition: A Combination of Socio – Scientific Participative and Artistic Elements. *Qualitative Sosial Research*. (Vol. 9): 3.
- Bodnar, H.G., and Hopwood, S.W., 2010. *Accounting Information System*. Tenth Edition. Pearson Education, Inc.
- Curtis, M.B., and Wu, F.H., 2000. The Components of a Comprehensive Framework of Internal Control. *The CPA Journal*. (Vol. 70): 3.
- Colbert, J.L., 2004. The PCAOB Standart on Internal Control: What Should Internal Auditor Expect?. *Internal Auditing Research*. (Vol. 19): 3.
- Cornett, C., Gramling, A., and Hargett, A.C., 2005. Internal Control Reporting: Issues of Concern to Internal Auditors and Reactions. *Internal Auditing Research*. (Vol. 20): 6.
- Cahill, E., 2006. Audit Committee and Internal Audit Effectiveness in a Multinational Bank Subsidiary: A Case Study. *Journal of Banking Regulation*. (Vol.7): 1/2.
- Candrea, P.J., 2006. Controlling Internal Controls. *Public Administration Review*. (Vol. 66): 3.
- Chien, W., 2007. The Audit Committees, Internal Control and Financial Distress of Unites States Public Hospitals. Proquest Disertation and Thesis.

- Chtioui, T., and Dubuisson, S.T., 2011. Hard and Soft Controls: Mind The Gap. *International Journal of Business*. (Vol.16):3.
- Culley, R.M., and Hughey, J., 2008. Power and Public Participation in a Hazardous Waste Dispute: A Community Case Study. *Spring Science + Business Media*. (December): 99 – 114.
- Cappelletti, L., 2009. Performing an Internal Control Function to Sustain SOX 404 and Improve Risk Management: Evidence from Europe. *Management Accounting Quartely*. (Vol. 10): 4.
- Edwards, D., Kusel, J., and Oxner T., 2003. Internal Auditing in Hospitals. *Research and Perspective on Healthcare*. (Vol.81): 4.
- Fargher, N.L., and Gramling, A.A., 2010. Toward Improved Internal Controls. *The CPA Journal Research*. (Vol. 75): 6.
- Feizizadeh, A., 2012. Strengthening Internal Audit Effectiveness. *Indian Journal of Science and Technology*. (Vol. 5): 5.
- Flostoui, S., 2012. The Relationship Between Internal Audit and Fraud. *Buletin Sciintific*. (Vol.1): 33.
- Gauthier, S.J., 2006. Understanding Internal Control. *Government Finance Review*. (Vol. 22): 10.
- Gupta, P.P., and Thomson, J.C., 2006. Use of COSO 1992 in Management Reporting on Internal Control. *Strategic Finance*. (Vol. 88): 26.
- Garba, A., et.al. 2009. Present and Future Schistosomiasis Control Activities with Support from the Schistosomiasis Control Initiative in West Africa. *Cambridge University Press*. (July): 1731-1737.
- Hendrics, D., Cross, H.J., and Maghsoodloo, S., 2002. The Effectiveness of Control Structure Diagrams in Source Code Comprehension Activities. *IEEE Transaction on Software Engineering*. (Vol. 28): 5.
- Hendrojogi., 2002. *Koperasi: Azaz-azaz, Teori dan Praktek*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Hubbard, L.D., 2003. Understanding Internal Control. *The Internal Auditor Research*. (Vol. 60): 5.
- Hofman, L.D., 2009. Multiple Methods, Communicative Preferences and the Incremental Interview Approach Protocol. *Qualitative Social Research*. (Vol. 10): 1.
- Hedley, T.P., and Chorin, O.B., 2011. Auditing and Monitoring Activities Help Uncover Fraud and Assess Control Effectiveness. *The CPA Journal*. (June): 68 – 71.
- Janvrine, J.D., et.al., 2012. The Updated COSO Internal Framework: Recommendations and Opportunities for Future Research. *Journal of Information Systems*. (Vol. 26): 2.
- Khafid, 2010. *Evaluasi Sistem Pengendalian Intern Penerimaan Kas pada Koperasi Simpan Pinjam Sarana Aneka Jasa Cabang Wonosari Klaten*. Tesis, Universitas Sebelas Maret Surakarta.
- Kim, A.H., et.al. 2000. Opinion Leader's Support for Tobacco Control Policies and Participation in Tobacco Control Activities. *American Journal of Public Health*. (Vol. 90): 1282.
- Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia, 2002. *Sistem Pengendalian Intern*. Jakarta: Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM.
- Keiding, B.T., 2010. Observing Participating Observation – A- Re Description Based on Systems Theory. (Vol. 11): 3.
- Locatelli, M., 2002. Good Internal Controls and Auditor Independence. *The CPA Journal*. (Vol. 72): 12.
- Langhout. D.R., 2003. Reconceptualizing Quantitative and Qualitative Methods. *American Journal of Community Pychology*. Vol. 32: 3/4.
- Lee Kam Chung, C., 2003. Elements of An Effective Internal Audit Intranet Website. *Internal Auditing*. (Vol. 18): 1.
- Margareth, A., O., and Dorothy, M., 2002. Internal Control Reporting and Users' Perceptions of Financial Statement Realibility. *American Business Review*. (Vol.20): 1.

- Michael, D., 2008. How to Comply with Sarbanes – Oxley Section 404: Assessing the Effectiveness of Internal Control.
- Mulyadi., 2001. Sistem Akuntansi. Universitas Gadjah Mada: Salemba Empat.
- Muljono, D., 2012. Buku Pintar Strategi Bisnis Koperasi Simpan Pinjam. Yogyakarta: Andi.
- Noland, T., G., and Flesher, D., L., 2003. An Assessment of The Internal Auditor's Impact in Small Banks. *Internal Auditing*. (Vol. 18): 1.
- Poma, N., 2003. Take Control of Your Activities. *Quality Progress*. (Vol. 36):12.
- Peurseem, K. V., 2004. Internal Auditor's Role and Authority. *Managerial Auditing Journal*. (Vol. 19): 3
- Palsson, H., 2007. Participant Observation in Logistic Research. *International Journal of Physical Distribution and Logistic Management*. (Vol. 37): 2.
- Olach, T., and Weeramantri, S., 2009. How COSO has Improved Internal Controls in The United States. *Internal Auditing*. (Vol. 24): 6.
- Oanta, P.F., 2012. Strategic Planning Model of Internal Audit in the Field of Defense. *Management and Economics*. (Vol. 67): 3.
- Rezaee, Z., 1994. Implementing The COSO Report. *Management Accounting*. (Vol. 76): 1.
- Ricketts, J.B., 1992. New Internal Control Framework and Evaluation Proposed by COSO. *Ohio CPA Journal*. (Vol. 51):3.
- Rife, R., 2006. Planning for Success. *The Internal Auditor*. (Vol. 63): 5.
- Stevens, M.G., 2003. Focus on Internal Controls. *The Practical Accountants Research*. (Vol. 36): 12.
- Savage, A., Norman, C.S., and Lancaster. K.A.S., 2008. Using a Movie to Study the COSO Internal Framework: An Instructional Case. (Vol.22): 1.
- Sancez, M, et.al., 2010. Smoking Behavior, Involuntary Smoking, Attitudes Towards Smoke – Free Legislations and Tobacco Control Activities in the European Union. *Plouse One*. (Vol.5): 11.
- Szczepankiewicz, I.E., 2010. Internal Audit as Management Improvement Tool in the Healthcare Sector Unit. Overview Paper of Poznan University of Economic, Poland. (Vol. 17): 1.
- Sawalqa, A. F., and Qtish, A., 2012. Internal Control and Audit Program Effectiveness: Empirical Evidence to Jordan. *International Business Research*. (Vol. 5): 9.
- Sumarsono, Sonny, 2003. Manajemen Koperasi: Teori dan Praktek. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Tunggal, A. W., 2002. Akuntansi untuk Koperasi. Jakarta: PT. Rineka Cipta.
- Undang – Undang Koperasi Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 30, 32, 38 dan 39 tentang Tugas dan Wewenang Pengawas serta Pengurus.
- Waxman, R. N., 2004. A Test of Control. *The CPA Journal*. (Vol. 74): 8.
- Willis, D.M., and Lightle, S.S, 2000. Management Reports on Internal Controls. *Journal of Accountancy*. (Vol. 190): 57.
- Wiredu, G.O., and Sorensen, C., 2006. The Dynamics of Control and Mobile Computing in Distributed Activities. *European Journal of Information Systems*. (Vol. 15): 307-319.
- White, S.D., 2007. The Auditor as Internal Consultant. *The Internal Auditor*. (Vol. 64): 1.
- Whitehouse, 2012. Improving Internal Audit and Control Functions.
- www.complianceweek.com.